

Penangkapan ikan - Pemeriksaan dokumen dan fisik kapal perikanan





© BSN 2015

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen ini dengan cara dan dalam bentuk apapun serta dilarang mendistribusikan dokumen ini baik secara elektronik maupun tercetak tanpa izin tertulis dari BSN

BSN
Email: dokinfo@bsn.go.id
www.bsn.go.id

Diterbitkan di Jakarta

Daftar isi

Daftar isi.....	i
Prakata	ii
1 Ruang lingkup.....	1
2 Istilah dan definisi	1
3 Pengajuan permohonan cek fisik (Perusahaan / Perorangan)	3
4 Persyaratan pemeriksaan dokumen dan fisik kapal perikanan	3
5 Komponen pemeriksaan fisik kapal perikanan	4
6 Persyaratan petugas pemeriksa dokumen dan fisik kapal perikanan.....	4
7 Prosedur verifikasi dokumen dan pemeriksaan fisik kapal perikanan	4
8 Prosedur pemeriksaan fisik	5
9 Waktu dan tempat pemeriksaan.....	5
10 Laporan hasil pemeriksaan.....	5
Lampiran A_(informatif) Alur proses administrasi dan pelaksanaan verifikasi dokumen dan pemeriksaan fisik kapal perikanan lingkup direktorat jenderal perikanan tangkap.....	8
Bibliografi	9

Prakata

Standar penangkapan ikan - pemeriksaan dokumen dan fisik kapal perikanan, disusun dengan maksud untuk :

1. Membuat pembakuan prosedur pengajuan permohonan pemeriksaan dokumen dan fisik kapal perikanan dalam rangka memperoleh dan memperpanjang Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) dan Buku Kapal Perikanan (BKP)
2. Menyeragamkan penamaan istilah – istilah pada pemeriksaan dokumen dokumen dan fisikfisik kapal perikanan.
3. Menyiapkan bahan acuan atau pedoman bagi petugas pemeriksaan dokumen dan fisik kapal perikanan.

Standar ini dirumuskan oleh Sub Komite Teknis 65-05-S1 Perikanan Tangkap, yang telah dibahas melalui rapat teknis dan terakhir disepakati dalam rapat konsensus pada tanggal 03-05 Desember 2014 di Semarang.

Standar ini telah melalui proses jajak pendapat dan perpanjangan jajak pendapat pada tanggal 2 Maret 2015 hingga 1 Juni 2015 dengan hasil akhir RASNI.



Penangkapan ikan - Pemeriksaan dokumen dan fisik kapal perikanan

1 Ruang lingkup

Standar ini menetapkan istilah dan definisi, pengajuan permohonan dan pelaksanaan pemeriksaan dokumen dan fisik kapal perikanan.

2 Istilah dan definisi

Untuk tujuan penggunaan dokumen ini, istilah dan definisi berikut digunakan

2.1

kapal perikanan

kapal atau perahu atau alat apung lainnya yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan dan penelitian/eksplorasi perikanan

2.2

kapal penangkap ikan

kapal perikanan yang secara khusus dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan dan mengangkutnya

2.3

kapal pengangkut ikan

kapal perikanan yang secara khusus dipergunakan untuk menangkap ikan termasuk mengangkut, menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan

2.4

kapal pendukung operasi penangkapan ikan

kapal yang secara khusus dirancang dan dibangun untuk memenuhi kebutuhan perbantuan operasi penangkapan ikan yang tidak dapat dioperasikan sebagai kapal penangkap maupun pengangkut.

2.5

panjang keseluruhan (LOA)

panjang terbesar (maksimum) dari kapal

2.6

lebar maksimum (B)

lebar terbesar (maksimum) dari kapal

2.7

tinggi maksimum (D)

jarak tegak terbesar (maksimum) yang diukur ditengah kapal.

2.8

sarat kapal (d)

jarak tegak yang diukur dari lunas sampai garis air .

2.9

dokumen kapal

dokumen yang terkait dengan surat-surat kapal dan perizinan perikanan

2.10

pemeriksaan dokumen dan fisik kapal perikanan

penilikan kesesuaian antara dokumen dan fisik kapal

2.11

pemeriksaan fisik kapal perikanan

penilikan pengukuran terhadap besaran, jenis, tipe dan mesin kapal termasuk peralatan bantu dan alat penangkapan ikan yang ada di kapal perikanan

2.12

pelaporan dan resume hasil pemeriksaan dokumen dan fisik kapal perikanan

tindakan penyusunan pelaporan setelah melaksanakan tugas pemeriksaan dokumen dan fisik kapal perikanan, meliputi pelaporan pelaksanaan tugas, resume, dan rekomendasi hasil pemeriksaan kepada pejabat yang berwenang

2.13

pendaftaran kapal perikanan

kegiatan pencatatan kapal perikanan yang dimuat dalam buku kapal perikanan

2.14

penerbitan surat tanda pendaftaran kapal perikanan

proses penerbitan surat tanda pendaftaran kapal perikanan oleh Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang untuk mendaftarkan kapal perikanan

2.15

surat permohonan pengajuan cek fisik (perusahaan / perorangan)

permohonan Pemeriksaan Dokumen dan fisik Kapal Perikanan yang disampaikan secara tertulis oleh Pemilik kapal perikanan atau yang diberi kuasa oleh pemilik kepada pejabat yang berwenang dengan mencantumkan waktu dan tempat pemeriksaan serta jumlah dan tipe kapal perikanan yang akan diperiksa.

2.16

verifikasi dokumen kapal perikanan

pemeriksaan untuk memastikan kesesuaian dan kelengkapan dokumen kapal perikanan yang disampaikan pada saat permohonan pemeriksaan dokumen dan fisik kapal perikanan.

2.17

penunjukan petugas pemeriksa dokumen dan fisik kapal perikanan

penunjukan / penugasan kepada Petugas Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Tugas (SPT) pejabat yang berwenang

2.18

pelaksanaan pemeriksaan dokumen dan fisik kapal perikanan.

tindakan pemeriksaan terhadap kondisi dokumen dan fisik kapal perikanan meliputi identifikasi, pengukuran, pencatatan dan dokumentasi

2.19

pemeriksaan fisik kapal perikanan

tindakan pemeriksaan meliputi pemeriksaan bagian di atas dan di bawah dek.

2.20**pemeriksaan mesin utama**

tindakan pemeriksaan terhadap mesin utama meliputi nomor seri, merk, dan daya.

2.21**pemeriksaan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan**

tindakan pemeriksaan terhadap alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan meliputi: tipe, ukuran, jenis, jumlah dan bahan yang digunakan.

2.22**surat persetujuan berlayar (SPB)**

dokumen Negara yang dikeluarkan oleh Syahbandar pada setiap kapal yang akan berlayar meninggalkan Pelabuhan setelah kapal memenuhi persyaratan kelaiklautan dan kewajiban lainnya

2.23**surat izin penangkapan ikan (SIPI)**

izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SIUP

2.24**surat izin kapal pengangkut ikan (SIKPI)**

izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan

3 Pengajuan permohonan cek fisik (Perusahaan / Perorangan)

Permohonan pemeriksaan dokumen dan fisik kapal perikanan yang disampaikan secara tertulis oleh pemilik kapal perikanan atau yang diberi kuasa oleh pemilik kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap dengan mencantumkan waktu dan tempat pemeriksaan serta jumlah dan tipe kapal perikanan yang akan diperiksa.

4 Persyaratan pemeriksaan dokumen dan fisik kapal perikanan

Dokumen yang di persyaratkan pada pemeriksaan dokumen dan fisik kapal perikanan sebagai berikut :

- 1) fotokopi SIUP;
- 2) fotokopi bukti kepemilikan kapal (grosse akte) atau akta hipotik dan/atau perubahannya;
- 3) rekomendasi dari Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, untuk kapal pengangkut ikan hasil budidaya;
- 4) fotokopi KTP pemilik kapal/penanggung jawab perusahaan dengan menunjukkan aslinya;
- 5) fotokopi surat ukur kapal;
- 6) fotokopi surat tanda kebangsaan kapal;
- 7) fotokopi sertifikat kelaikan dan pengawakan kapal untuk kapal penangkap ikan atau fotokopi sertifikat keselamatan untuk kapal pengangkut ikan;
- 8) surat keterangan penghapusan dari daftar kapal yang diterbitkan oleh Negara asal untuk kapal perikanan yang dibeli atau diperoleh dari luar negeri dan sudah terdaftar di negara asal; dan
- 9) surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bertanggung jawab atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan.
- 10) desain alat penangkapan ikan

5 Komponen pemeriksaan fisik kapal perikanan

Komponen-komponen, yang dipersyaratkan pada pemeriksaan fisik kapal perikanan sebagai berikut :

1. Kapal Penangkap Ikan dan/atau Kapal Pengangkut Ikan dan/atau kapal pendukung operasi penangkapan ikan:
 - a. Identitas kapal meliputi nama kapal, tanda selar dan tanda pengenalan kapal perikanan (kecuali izin baru).
 - b. Bahan utama konstruksi kapal meliputi besi, kayu, fibreglass.
 - c. Palka ikan meliputi jumlah palka dan jenis pendingin (es atau sistem refrigrasi)
 - d. Ukuran pokok kapal meliputi panjang kapal seluruhnya (length overall/LOA) dan Lebar kapal (Breadth/B). Perbedaan data antara hasil pengukuran dengan data dalam dokumen kapal diberikan toleransi atau yang dapat diterima, lebih kurang sebesar 5 % (lima persen) dari data dalam dokumen kapal.
2. Pemeriksaan mesin utama (*main engine*) terpasang, meliputi:
 - a. Merek mesin;
 - b. Nomor seri mesin;
 - c. Informasi type dan daya mesin.
3. Pemeriksaan alat penangkapan ikan, Pemeriksaan fisik terhadap alat penangkapan ikan yang digunakan pada kapal penangkap ikan meliputi jenis dan ukuran alat penangkapan ikan.
4. Pemeriksaan kelayakan penanganan dan penyimpanan:
 - a. Lingkungan kapal;
 - b. Tata letak dan konstruksi kapal;
 - c. Personal hygiene;
 - d. Toilet
 - e. Peralatan dan Perlengkapan penanganan ikan;
 - f. Bahan kimia;
 - g. Es dan air;
 - h. Pengendalian binatang penyebar penyakit (pest);
 - i. Penanganan limbah;
 - j. System pendingin/pembekuan;
 - k. Penanganan ikan;
 - l. Lain-lain.

6 Persyaratan petugas pemeriksa dokumen dan fisik kapal perikanan

- (a) Petugas pemeriksa dokumen dan fisik kapal perikanan harus mempunyai brevet cek fisik kapal dari Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
- (b) Petugas pemeriksa dokumen dan fisik kapal perikanan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktorat Jenderal

7 Prosedur verifikasi dokumen dan pemeriksaan fisik kapal perikanan

Pemeriksaan untuk memastikan kesesuaian dan kelengkapan dokumen kapal perikanan yang disampaikan pada saat permohonan pemeriksaan dokumen dan fisik kapal perikanan. Verifikasi ini menghasilkan 2 (dua) kesimpulan yaitu : 1) *dapat* dilaksanakan pemeriksaan

fisik kapal terhadap dokumen yang sesuai dan lengkap; dan 2) *tidak dapat* dilaksanakan pemeriksaan fisik kapal karena dokumen yang disampaikan tidak sesuai dan kurang lengkap

- (a) Penunjukan Petugas Pemeriksa Dokumen dan fisik Kapal Perikanan
Penunjukan Petugas Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah (SP) Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, atau dari Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi sesuai penugasan yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Perikanan Tangkap. Selanjutnya Petugas yang telah ditunjuk segera melaksanakan pemeriksaan dokumen dan fisik kapal perikanan sesuai dengan ketentuan yang tertera pada Surat Perintah Tugas (SPT) tersebut.
- (b) Pelaksanaan Pemeriksaan Dokumen dan fisik Kapal Perikanan.
Pemeriksaan dokumen dan fisik kapal perikanan dilaksanakan meliputi identifikasi, pengukuran, pencatatan dan dokumentasi (photo petugas di atas kapal) sesuai dengan ruang lingkup pemeriksaan.
- (c) Pelaporan dan Resume Hasil Pemeriksaan Dokumen dan fisik Kapal Perikanan.
Setelah melaksanakan tugas pemeriksaan fisik kapal perikanan, petugas segera membuat laporan, resume, dan rekomendasi hasil pemeriksaan dan dalam tempo 3 (tiga) hari wajib menyerahkan laporan kepada pemberi tugas yaitu Direktur Jenderal Perikanan Tangkap.

8 Prosedur pemeriksaan fisik

Prosedur pemeriksaan fisik kapal perikanan meliputi kapal penangkap, kapal pengangkut, kapal penangkap dan pengangkut serta kapal pendukung operasi penangkapan ikan. Pemeriksaan fisik kapal perikanan dimaksud untuk: (a) kapal yang pengadaannya bukan dalam rangka impor (b) dalam rangka penerbitan SIPI/SIKPI. Sebelum dilakukan pemeriksaan fisik kapal terlebih dahulu dilakukan verifikasi terhadap dokumen kapal perikanan oleh Direktorat Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan.

9 Waktu dan tempat pemeriksaan

- (a) waktu dan tempat pemeriksaan dokumen dan fisik kapal perikanan dilaksanakan sesuai dengan yang tertera pada Surat Perintah.
- (b) bilamana karena sesuatu hal yang mengakibatkan tertundanya waktu pemeriksaan, maka penentuan kepastian lebih lanjut waktu pemeriksaan dapat diatur antar petugas yang ditunjuk dengan dan pihak yang berkepentingan dengan membuat laporan penundaan pemeriksaan kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap.
- (c) apabila penundaan waktu pemeriksaan fisik kapal perikanan oleh pihak yang berkepentingan mengakibatkan terganggunya kegiatan petugas, maka SPT dapat dibatalkan.

10 Laporan hasil pemeriksaan

Laporan hasil pemeriksaan kapal perikanan meliputi :

1. Petugas pemeriksa fisik kapal perikanan wajib menyampaikan laporan hasil pemeriksaan fisik kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan yang telah diketahui oleh pihak pemohon atau yang diberi kuasa, kepada Direktur Jenderal melalui Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkap Ikan. Laporan tersebut harus disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak berakhirnya masa penugasan menurut Surat Perintah.
2. Laporan hasil pemeriksaan fisik kapal Penangkap Ikan dan/atau kapal pengangkut ikan terdiri dari:

- a. Berita Acara Pemeriksaan Fisik Kapal Penangkap Ikan dan/atau kapal pengangkut ikan (**Format 4**).
- b. Ringkasan laporan pemeriksaan fisik kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan (**Format 5**).
3. Dalam ringkasan laporan pemeriksaan fisik kapal Penangkap Ikan dan/atau kapal pengangkut ikan, petugas pemeriksa membuat rekomendasi hasil pemeriksaan (kesimpulan petugas).
4. Rekomendasi hasil pemeriksaan fisik kapal Penangkap Ikan dan/atau kapal pengangkut ikan sebagaimana dimaksud pada butir (3) berupa :

Rekomendasi dari petugas:

1. Pemeriksaan fisik KM. dilaksanakan dalam rangka (perubahan/penerbitan SIPI-OT/SIPI-GI/SIPI-LI/SIPI-L/P/SIKPI-KI/SIKPI-OA/SIKPI-PP/SIKPI-SN/SIKPI-NA/SIKPI-NI/SIKPI-GI), perpanjangan tahun kedua atau setelah perbaikan/*docking* dari luar negeri dan/atau penerbitan/perubahan Buku Kapal Perikanan *)
2. Hasil pengukuran fisik KM.....**sesuai/tidak sesuai** dengan data dalam dokumen kapal.
3. Hasil pengukuran fisik alat penangkapan ikan **sesuai/tidak sesuai** dengan spesifikasi teknis alat penangkapan ikan yang terdapat di atas kapal.
4. Permohonan KM. (dapat/ tidak dapat) *) dipertimbangkan dalam rangka (perubahan/ penerbitan SIPI-OT/SIPI-GI/SIPI-LI/SIPI-L/P/SIKPI-KI/SIKPI-OA/SIKPI-PP/SIKPI-SN/SIKPI-NA/SIKPI-NI/SIKPI-GI) perpanjangan tahun kedua atau setelah perbaikan/*docking* dari luar negeri dan/atau penerbitan dan/atau perubahan Buku Kapal Perikanan.
5. Lain-lain (.....)

Catatan : *) coret yang tidak perlu.

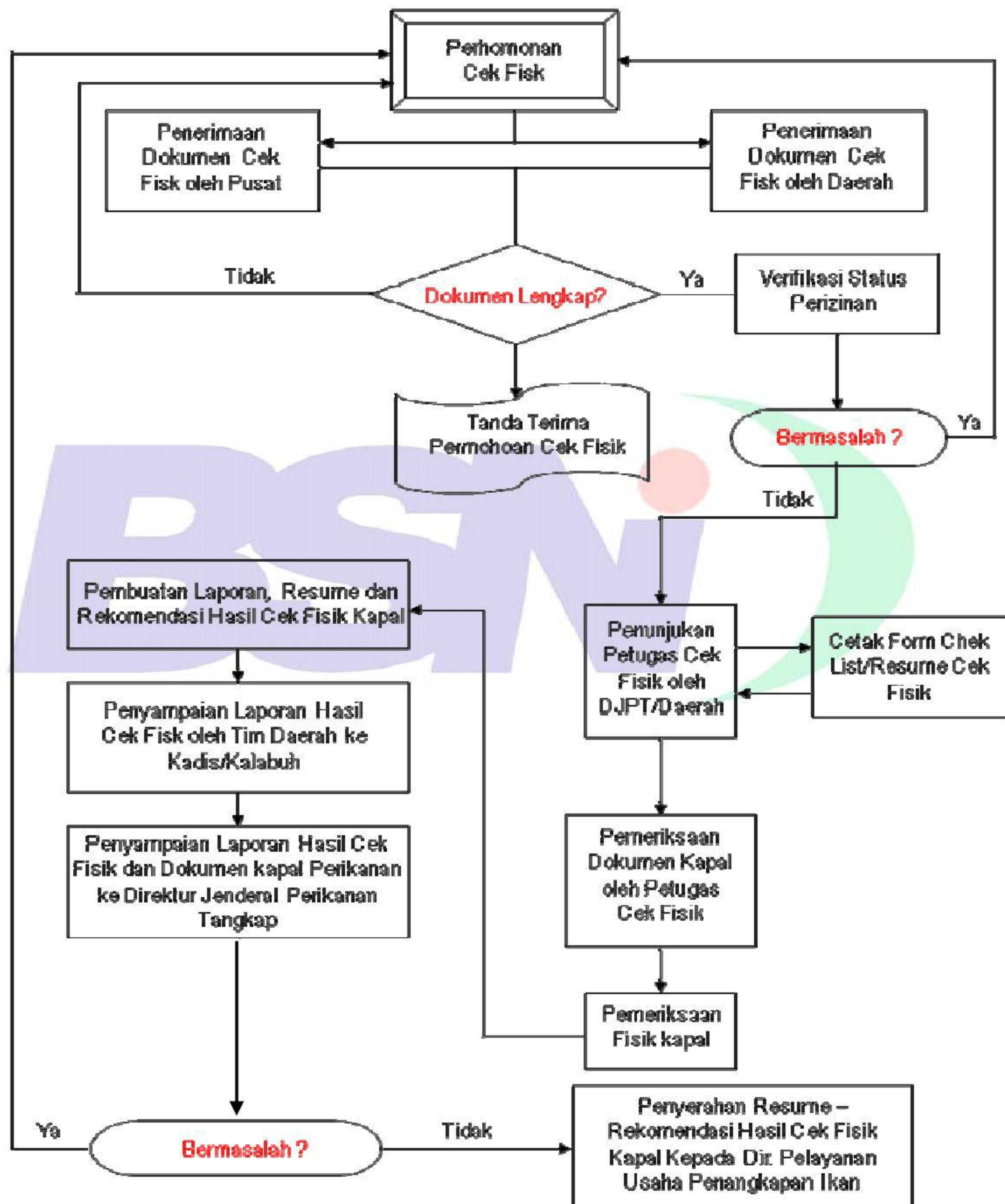
5. Laporan hasil pemeriksaan fisik kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan yang dilakukan oleh petugas daerah, harus diketahui terlebih dahulu oleh Kepala Unit Kerja bersangkutan sebelum disampaikan kepada Direktur Jenderal melalui Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkap Ikan.
6. Laporan sebagaimana dimaksud pada butir (5) dibuat dalam rangkap 3 (tiga), masing-masing untuk Direktur Jenderal, Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkap Ikan dan Direktur Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan. Jika terjadi keterlambatan dalam penyampaian laporan, petugas wajib menyampaikan alasan mengenai keterlambatan penyampaian laporan tersebut kepada pemberi tugas.
7. Laporan hasil pemeriksaan fisik kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan harus dilengkapi dengan foto dokumentasi pada saat melakukan pemeriksaan :
 - a. Kasko atau bangunan kapal :
 - 1) foto petugas dengan latar belakang identitas kapal.
 - 2) foto petugas ketika mengukur LOA dan B kapal.
 - 3) foto petugas ketika mencermati jumlah palka ikan.
 - 4) foto seluruh bangunan kapal tampak samping (tampak haluan dan buritan), sekaligus untuk persyaratan penerbitan Buku Kapal Perikanan.
 - b. Mesin Utama Kapal :
 - 1) foto petugas ketika mencermati nomor seri mesin utama kapal.
 - 2) foto nomor seri mesin utama kapal dan/atau hasil kir (gesek) nomor seri mesin utama kapal.
 - c. Alat penangkapan ikan yakni foto petugas ketika mengukur bagian alat penangkapan ikan yang dipersyaratkan.

- d. Pemeriksaan aspek sanitasi dan hygiene yakni foto petugas ketika mencermati lingkungan kapal, peralatan dan perlengkapan penanganan ikan, toilet, es dan air, bahan kimia, pengendalian binatang penyebar penyakit (pest), penanganan limbah, system pendingin/pembekuan.
- 8. Laporan hasil pemeriksaan fisik kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan disusun sebagai berikut:
 - a. Sampul.
 - b. Pengantar laporan dari petugas pemeriksa.
 - c. Berita Acara.
 - d. Laporan hasil pemeriksaan
 - e. Surat Pernyataan Kebenaran Data.
 - f. Surat Kuasa dari Pemilik Kapal (dalam hal pengurusan dikuasakan kepada pihak lain)
 - g. Surat Perintah.
 - h. Ringkasan hasil pemeriksaan fisik kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan.
 - i. Lembar Pemberitahuan Pelaksanaan Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (Data Hasil Verifikasi).
 - j. Spesifikasi teknis alat penangkapan ikan yang digunakan.
 - k. Foto-foto dokumentasi saat kegiatan pemeriksaan.
 - l. Fotokopi dokumen kapal berupa surat ukur atau grosse akta atau tanda kebangsaan kapal.



Lampiran A (informatif)

ALUR PROSES ADMINISTRASI DAN PELAKSANAAN VERIFIKASI DOKUMEN DAN PEMERIKSAAN FISIK KAPAL PERIKANAN LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP



Bibliografi

Metode Pengukuran Alat Penangkapan Ikan, Endroyono, Direktorat Kapal Perikanan Dan Alat Penangkapan Ikan, 2010

